



**INSPEKTORAT
PROVINSI DKI JAKARTA**

LAPORAN FINAL SURVEI ZONA PEMBANGUNAN INTEGRITAS



JAKARTA
— INDONESIA —



SUCOFINDO ADVISORY

MARET 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Lokasi dan Waktu Kegiatan.....	2
BAB II METODOLOGI SURVEI	3
2.1 Target Populasi.....	3
2.2 Penentuan Sampel.....	3
2.3 Metode Analisis	3
2.3 Metode Pencacahan	4
2.4 Pengolahan Data dan Analisis Survei	4
2.4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	6
2.5 Personil Kegiatan.....	6
BAB III KUESIONER SURVEI	8
3.1 Demografi Responden.....	8
3.2 Instrument Indeks IPKP dan IPAK	8
3.3 Pertanyaan Terbuka.....	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Demografi Responden.....	11
4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Hasil Survei	12
4.3 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)	13
4.4 Hasil Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK).....	15
4.5 Hasil Perbandingan Nilai Kualitas Pelayanan (IPKP) (Februari Vs Maret Tahun 2024)	16
4.6 Hasil Perbandingan Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK) (Februari Vs Maret Tahun 2024).....	17
4.7 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Per Bidang	18
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	19
5.1 Kesimpulan.....	19
5.2 Saran	19

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	6
Tabel 2. 2 Personil Kegiatan.....	6
Tabel 3. 1 Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)	9
Tabel 3. 2 Kuesioner Persepsi Anti Korupsi (IPAK).....	10
Tabel 4. 1 Sebaran Demografi Responden.....	11
Tabel 4. 2 Hasil Uji validitas.....	12
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Reliabilitas.....	13
Tabel 4. 4 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)	13
Tabel 4. 5 Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK).....	15
Tabel 4. 6 Perbandingan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)	16
Tabel 4. 7 Perbandingan Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK).....	17
Tabel 4. 8 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Per Bidang	18
Tabel 5. 1 Saran Per Bidang	20

Daftar Gambar

Gambar 4. 1 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP).....	14
Gambar 4. 2 Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	15
Gambar 4. 3 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Per Bidang.....	18
Gambar 5. 1 Saran	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

- **Visi**

Menjadi Lembaga Pengawas Internal Terdepan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- **Misi**

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Terpercaya .
2. Mengembangkan Sistem Pengawasan Untuk Menjamin Mutu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
3. Penguatan Instrumen Pengawasan Terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat.
4. Mewujudkan Lingkungan Kerja Yang Solid dan Kondusif.
5. Meningkatkan Pembinaan Terhadap Instansi dan Koordinasi Dengan Stakeholder.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja suatu instansi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi penting dalam menciptakan tata kelola yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi sebuah instansi untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Survei Zona Pembangunan Integritas dan Survei persepsi kualitas pelayanan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data mengenai persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kepuasan, harapan, serta tingkat kepentingan yang diberikan pada berbagai aspek pelayanan publik yang diberikan.

Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan survei oleh konsultan, akan dibentuk tim pendamping pelaksanaan survei INSPEKTORAT DKI JAKARTA yang terdiri dari PSMK dan satker pemilik IKU Indeks. Tim pendamping akan menyiapkan materi survei yang berkaitan dengan IKU Indeks dan memberikan pembekalan mengenai bisnis proses masing-masing satker tersebut untuk menjadi bahan bagi konsultan survei dalam penyusunan kuesioner indeks. Konsultan mampu memberikan masukan dan arahan terkait metode survei dan pengolahan data yang dapat menghasilkan kevalidan baik dari sisi data maupun Analisa hasil

survei. Selain itu, keberadaan konsultan survei juga diharapkan bisa memberikan bimbingan teknis bagi tim pendamping pelaksanaan survei INSPEKTORAT DKI JAKARTA dalam hal pemanfaatan laporan hasil survei.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan survei adalah :

- a. Untuk mendapatkan hasil pengukuran indeks persepsi kualitas pelayanan (IPKP) 2024 yang obyektif, komprehensif dan berkualitas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh satker terkait untuk lebih meningkatkan kinerjanya;
- b. Untuk mendapatkan hasil pengukuran indeks persepsi anti korupsi (IPAK) tahun 2024 yang obyektif, komprehensif dan berkualitas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh satker terkait untuk lebih meningkatkan kinerjanya.
- c. Mengetahui interpretasi (cara membaca) indeks yang didapat.
- d. Memberikan rekomendasi yang bersifat strategis dari hasil survey.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a Melakukan perumusan pelaksanaan survei yang meliputi penentuan metode, indikator kepuasan, penyusunan kuesioner, pemilihan dan penentuan jumlah sampel, penentuan tempat & waktu pelaksanaan dan termasuk juga pelaksanaan survei.
- b Melakukan pengumpulan data dari sampel responden internal dan eksternal Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Responden internal adalah pegawai INSPEKTORAT DKI JAKARTA yang terdiri atas Pimpinan, JFT dan Pelaksana. Sedangkan responden eksternal adalah Perangkat Daerah, BPK, BPK, Itjen Kemendagri, dan Stakeholder lainnya.
- c Melakukan pengolahan data perhitungan indeks dan penarikan kesimpulan
- d Menyusun laporan hasil survei secara keseluruhan.
- e Memberikan bimbingan teknis terkait penyajian laporan hasil survei kepada tim pendamping pelaksanaan survei INSPEKTORAT DKI JAKARTA.
- f Melakukan presentasi atas hasil survei di hadapan Pimpinan

1.4 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan survey Pembangunan zona integritas Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan indek kualitas pelayanan berada di wilayah DKI Jakarta. Waktu pengerjaan adalah 30 hari kerja.

BAB II METODOLOGI SURVEI

2.1 Target Populasi

Target populasi adalah kelompok individu yang menjadi subjek penelitian atau survei. Dalam konteks survei ini, target populasi adalah seluruh pemangku kepentingan (stake holder) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang memiliki akses terhadap pelayanan inspektorat baik dari internal maupun eksternal Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Dalam penentuan target populasi, perlu mempertimbangkan batasan dan kriteria yang relevan dengan tujuan survei, seperti kategori responden yang menjadi fokus Inspektorat Provinsi DKI Jakarta survei, periode waktu penggunaan layanan, atau jenis layanan yang tersedia. Pemilihan target populasi yang tepat akan mempengaruhi hasil survei yang valid dan representatif.

2.2 Penentuan Sampel

Penentuan sampel adalah proses memilih sebagian populasi untuk dijadikan sampel survei. Dalam survei ini, penentuan sampel perlu dilakukan karena tidak mungkin mengumpulkan data dari seluruh Pegawai dan Mahasiswa yang menggunakan layanan kampus. Sampel dalam survei ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih responden yang dianggap representatif dari target populasi. Sebanyak 45 responden diambil secara acak dari populasi yang memenuhi kriteria sebagai sampel survei. Kriteria pemilihan responden adalah mereka yang pernah menggunakan layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Pemilihan sampel yang tepat juga perlu mempertimbangkan ukuran sampel yang sesuai dengan populasi yang diambil, sehingga dapat meminimalkan bias dan error dalam hasil survei. Semakin besar ukuran sampel, semakin akurat hasil survei, namun semakin besar juga biaya dan waktu yang diperlukan.

2.3 Metode Analisis

Metode analisis adalah teknik untuk menganalisis dan mengolah data survei menjadi informasi yang berguna dan dapat dipahami. Dalam survei ini, metode analisis yang dapat digunakan adalah :

1. Pengujian validitas dan Reliabilitas dari hasil pengisian survey.

Uji Validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan suatu alat ukur atau media ukur untuk memperoleh data. Pengujian digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu kuesioner untuk memperoleh data, lebih tepat untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kuesioner.

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui

konsistensi alat ukur, apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dikatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Biasanya sebelum dilakukan uji reliabilitas data, dilakukan uji validitas data. Hal ini dikarenakan data yang akan diukur harus valid, dan baru dilanjutkan dengan uji reliabilitas data. Namun, apabila data yang diukur tidak valid, maka tidak perlu dilakukan uji reliabilitas data.

2. Analisis statistik deskriptif.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh dari survei dalam bentuk angka dan grafik, seperti rata-rata, median, modus, dan distribusi data. Dalam konteks survei ini, analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai IPAK, IPKP, dan nilai survei. Selain itu, dapat juga digunakan teknik grafik, seperti diagram batang untuk memvisualisasikan data survei. Setelah data survey dianalisis, hasil analisis dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan memperbaiki aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Hasil analisis juga dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi atau tindak lanjut untuk perbaikan layanan ke depannya.

2.3 Metode Pencacahan

Metode pencacahan atau teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi yang lebih besar. Dalam survei ini, teknik sampling yang digunakan adalah convenience sampling atau pengambilan sampel yang praktis. Dalam convenience sampling, responden dipilih berdasarkan ketersediaan dan kemudahan dalam memilih responden. Dalam survei ini, responden dipilih berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas mereka sebagai penerima layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, convenience sampling dipilih karena praktis dan efektif untuk mengumpulkan data dari populasi yang terbatas, seperti mahasiswa sebagai penerima layanan. Namun, convenience sampling juga memiliki kelemahan yaitu dapat menghasilkan sampel yang tidak representatif karena responden dipilih berdasarkan kemudahan dan ketersediaan. Oleh karena itu, hasil survei ini perlu dianalisis dengan hati-hati dan perlu dilakukan pengecekan terhadap karakteristik responden yang terpilih.

2.4 Pengolahan Data dan Analisis Survei

a. Proses pemeriksaan data (*cleaning*)

Pada tahapan ini dilakukan proses pemeriksaan data hasil survei.

Pemeriksaan data dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain:

- 1) Memeriksa kuesioner yang masuk apakah layak untuk diproses atau didrop, bilamana jawaban tidak lengkap;

- 2) Memeriksa kelengkapan dan kejelasan jawaban;
- 3) Memeriksa konsistensi antar jawaban dan relevansinya.

b. Proses Pengkodean data

Tahapan selanjutnya adalah memberi kode data dimana setiap pertanyaan dan pilhan jawaban diberikan kode untuk memudahkan dalam pengolahan data.

c. Proses tabulasi data

Proses tabulasi data adalah proses data entry atau memasukkan seluruh data kuesioner yang terdiri bagian A (Data Responden), bagian B (Pertanyaan Penilaian dan Pertanyaan Persetujuan) serta bagian C (Pertanyaan Masukan). Proses perhitungan data diolah adalah Program *Microsoft Excell* dan SPSS.

d. Proses Analisa data

Proses analisis data survei kepuasan mitra pengadaan barang dan jasa ini di menggunakan metode Deskriptif, Uji Validitas dan Reliabilitasm dan Perhitungan Index yang disederhanakan .

Langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembobotan pilihan jawaban yang tersedia berdasakan skala likert 4 (empat) point.
- 2) Perhitungan Index Kepuasan dengan menggunakan total skor jawaban responden. Penggunaan total skor untuk menghindari penggunaan nilai rata-rata , karena skala data yang digunakan adalah ordinal sehingga tidak cocok menggunakan rata-rata. Perhitungan index kepuasan sebagai berikut:

$$Skor Index (\%) = \frac{\sum_{i=1}^n Si \times fi}{4 \times p}$$

Keterangan :

Si = skor pilihan 1, 2, 3 dan 4

fi = total frekuensi masing-masing pilihan Si

p= total responden

2.4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 2. 1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Uraian Kegiatan	M-1	M-2	M-3	M-4
Mendiskusikan lingkup pekerjaan dengan tim pendamping dan persiapan pelaksanaan survei INSPEKTORAT DKI JAKARTA				
Diskusi (<i>brainstorming</i>) dengan <i>key person</i> untuk membangun model kepuasan dan kuesioner internal dan eksternal.				
Finalisasi model kepuasan dan penjelasan kepada tim pendamping				
Finalisasi kuesioner				
Persiapan dan pelaksanaan pengumpulan data survei dari responden				
Pengolahan data survei dan penyusunan laporan hasil survei				
Penyerahan dan penjelasan hasil survei kepada tim pendamping pelaksanaan survei Inspektorat DKI Jakarta				
Penyerahan dan presentasi laporan pendahuluan				
Penyerahan laporan dwi mingguan				
Penyerahan laporan hasil survei dan presentasi				

2.5 Personil Kegiatan

Tabel 2. 2 Personil Kegiatan

Uraian Personil	Pendidikan/ Pengalaman	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Uraian Tugas Pekerjaan
Tenaga Ahli				
Ketua Peneliti Utama	S2/S3 (9 tahun)	1	30	Ketua Peneliti Utama bertindak sebagai <i>Project Director</i> yang bertanggung jawab terhadap design dan pendekatan survei, perencanaan <i>resource</i> /orang yang terlibat dalam survei, mengarahkan tim yang terlibat, merumuskan analisa dan rekomendasi atas hasil survei.



Uraian Personil	Pendidikan/ Pengalaman	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Uraian Tugas Pekerjaan
Anggota Peneliti Utama	S2 (9 tahun)	1	30	Anggota Peneliti Utama membuat design dan pendekatan survei, merencanakan <i>resource/orang</i> yang terlibat dalam suatu survei, mengarahkan tim yang terlibat, merumuskan analisa dan rekomendasi atas hasil survei.
Supervisor Surveyor	S2 (7 tahun)	1	30	Supervisor bertindak sebagai <i>Project Manager</i> yang bertanggung jawab dalam penulisan proposal, mengatur/mengarahkan executive dalam survei, memonitor <i>schedule</i> pelaksanaan survei, dan bertanggung jawab dalam analisa dan pembuatan laporan.
Tenaga Pendukung				
Surveyor Lapangan	SMA/SMK (7 tahun)	5	7	Surveyor lapangan adalah petugas survei yang melakukan pengumpulan data/informasi di lapangan berdasarkan desain dan metodologi yang telah ditetapkan untuk kebutuhan survey.

BAB III KUESIONER SURVEI

Kuesioner terdiri atas serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada target sampel, atau sekelompok orang, untuk mengumpulkan data. Merancang kuesioner harus dilakukan setelah maksud dan tujuan penelitian diselesaikan, yaitu setelah jelas informasi atau data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mengumpulkan data. Kuesioner harus dirancang sedemikian rupa sehingga jelas, mudah digunakan, serta informasi dapat diekstraksi dengan mudah dan akurat untuk input dan analisis data.

Kuesioner dapat dirancang oleh peneliti atau dapat pula berdasarkan kuesioner yang sudah tervalidasi. Kuesioner harus dapat mewakili informasi yang ingin diukur dalam penelitian. Jenis data yang dapat dikumpulkan menggunakan kuesioner bisa berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Kuesioner dapat menghasilkan hasil yang valid dan bermakna jika pertanyaannya jelas, tepat dan ditanyakan secara konsisten kepada semua responden. Oleh karena itu, pertimbangan yang cermat perlu diberikan pada desain kuesioner. Kuesioner yang dirancang dengan baik dapat membantu mengurangi kesalahan pengamatan dan pemrosesan sampel penelitian. Kuesioner yang akan disusun terdiri atas :

1. Demografi Responden
2. Indikator/Pertanyaan penyusun indeks IPKP dan IPAK
3. Pertanyaan terbuka berupa saran dan masukan

3.1 Demografi Responden

Demografi responden terdiri atas Pendidikan, Usia, Jenis Kelamin , dan Lama Bekerja.

3.2 Instrument Indeks IPKP dan IPAK

Fokus pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (SPKP). Survei IPAK dan IPKP dilakukan terhadap pengguna layanan (pemangku kepentingan) di setiap satuan kerja.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta meminta pendapat responden mengenai beberapa hal terkait kualitas dan integritas pemberian pelayanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Responden diminta memberi nilai antara 1 - 4 pada setiap pernyataan, di mana semakin

banyak yang menjawab bintang berupa poin 4 menunjukkan bahwa responden semakin setuju bahwa kualitas pelayanan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta semakin baik, sedangkan apabila memberikan bintang 1 berupa poin 1 berarti pelayanan semakin buruk. Beberapa daftar pertanyaan Kuesioner Survei Persepsi Kualitas Pelayanan ZI-WBK, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

No	Pertanyaan Kuesioner	Pilihan Jawaban				Alasan Memberi Nilai STB/TB
		Sangat Tidak Baik (STB)	Tidak Baik (TB)	Baik (B)	Sangat Baik (SB)	
1	Informasi Pelayanan pada unit layanan i di inspektorat provinsi DKI Jakarta tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik					
2	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta					
3	Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta mudah diikuti/dilakukan					
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta					
5	Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan					
6	Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta memberikan kenyamanan/mudah digunakan					
7	Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat					
8	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta mudah digunakan/diakses					

IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dan mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism). Beberapa daftar pertanyaan Kuesioner Survey Persepsi Korupsi, sebagai berikut .

Tabel 3. 2 Kuesioner Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

No	Pertanyaan Kuesioner	Pilihan Jawaban				Alasan Memberi Nilai STS/TS
		Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)	
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta					
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta					
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang /fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta					
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta					
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta					

3.3 Pertanyaan Terbuka

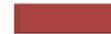
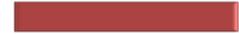
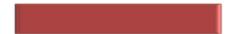
Pertanyaan terbuka meliputi Saran dan Masukan atas perbaikan dan juga alasan pemebrian nilai rendah pada setiap pertanyaan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Demografi Responden

Total target responden adalah 55 dengan persentase capaian responden sebanyak 53 responden atau 96%. Demografi responden meliputi Usia, Jenis Kelamin, Eselon, Pendidikan dan Lama Bekerja. Berikut adalah tabel sebaran demografi responden.

Tabel 4. 1 Sebaran Demografi Responden

Demografi		Frekuensi	Persen	Grafik
Usia 	30 - 35 Tahun	4	8%	
	36 - 40 Tahun	17	32%	
	41 - 45 Tahun	6	11%	
	46 - 50 Tahun	12	23%	
	> 50 Tahun	14	26%	
	Min	31		
	Max	60		
Jenis Kelamin 	Laki-laki	24	45%	
	Perempuan	29	55%	
Eselon 	Tidak ada Eselon	4	8%	
	II	1	2%	
	III	4	8%	
	III B	1	2%	
	IV	36	68%	
	IVa	7	13%	
Pendidikan 	D3	1	2%	
	S1	18	34%	
	S2	33	62%	
	S3	1	2%	
Lama Bekerja 	≤ 10 Tahun	5	9%	
	11 - 20 Tahun	28	53%	
	> 20 Tahun	20	38%	
	Min	2		
	Max	35		

Target total responden untuk survei bulan maret tahun 2024 sebanyak 55 dari perangkat daerah dengan capaian survei 96% yaitu total terkumpul 53 responden. Berdasarkan demografi responden didominasi usia 36-40 tahun (32%) dengan minimal usia 31 dan maksimal 60 tahun. Sebagian besar responden berjenis kelamin Perempuan (55%), dengan eselon IV (68%). Pendidikan terbanyak adalah S2 (62%) serta lama bekerja terbanyak

11-20 tahun (53%), responden dengan lama bekerja paling cepat adalah 2 tahun dan paling lama mencapai 35 tahun.

4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Hasil Survei

1. Hasil Pengujian Validitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Uji validitas

Variabel	Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
IPKP	IPKP 1	0.8552	0,2706	Valid
	IPKP 2	0.7789		Valid
	IPKP 3	0.8250		Valid
	IPKP 4	0.7966		Valid
	IPKP 5	0.6012		Valid
	IPKP 6	0.7172		Valid
	IPKP 7	0.7266		Valid
	IPKP 8	0.8427		Valid
IPAK	IPAK 1	0.8173		Valid
	IPAK 2	0.8474		Valid
	IPAK 3	0.9019		Valid
	IPAK 4	0.8899		Valid
	IPAK 5	0.8899		Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2024.

Dari hasil pengujian validitas pada tabel diatas, kuesioner yang berisi dari 2 variabel yaitu ada Delapan (8) pernyataan yang mengukur IPKP dan ada Lima (5) pernyataan yang mengukur IPAK. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak valid, kita harus mencari tau r tabelnya terlebih dahulu. Rumus dari r tabel adalah $df = N-2$ jadi $53-2 = 51$, sehingga $r\ tabel = 0,2706$. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa $r\ hitung > r\ tabel$ artinya seluruh pernyataan yang mengukur IPKP dan IPAK sudah Valid.

2. Hasil Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas untuk mengukur konsisten atau tidak kuesioner dalam penelitian Sebelum dilakukannya pengujian reliabilitas harus ada dasar pengambilan keputusan yaitu alpha sebesar 0,60. Variabel yang dianggap reliabel jika nilai variabel tersebut lebih besar dari

>0,60 jika lebih kecil maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena <0,60. Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
IPKP	0.933	Reliabel
IPAK	0.950	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2024.

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dapat dilihat bahwa cronbach's alpha pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu 0,933 > 0,60 hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dinyatakan reliabel. Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat dilihat bahwa cronbach's alpha pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu 0,950 > 0,60 hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dinyatakan reliabel.

4.3 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

Hasil perhitungan nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dapat diuraikan pada tabel berikut yang sudah diurutkan berdasarkan penilaian terendah sampai dengan penilaian tertinggi:

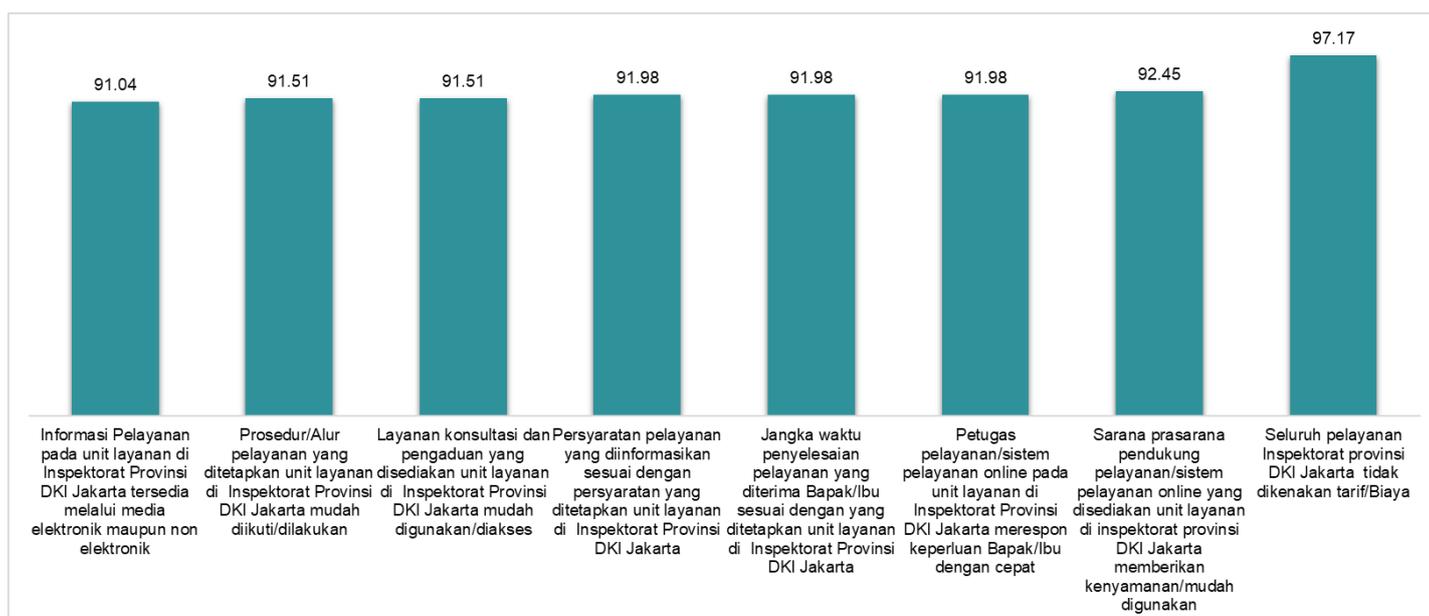
Tabel 4. 4 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

No	Pelayanan	Nilai
1	Informasi Pelayanan pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik	91.04
2	Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mudah diikuti/dilakukan	91.51
3	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mudah digunakan/diakses	91.51
4	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	91.98

No	Pelayanan	Nilai
5	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	91.98
6	Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat	91.98
7	Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta memberikan kenyamanan/mudah digunakan	92.45
8	Seluruh pelayanan Inspektorat provinsi DKI Jakarta tidak dikenakan tarif/Biaya	97.17
Nilai IPKP		92.45

Sumber: Data Primer Diolah, 2024.

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) secara keseluruhan memperoleh nilai 92.45. Nilai Tertinggi sebesar 97.17 terkait kesesuaian seluruh pelayanan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang tidak dikenakan tarif/Biaya. Nilai Terendah sebesar 91.04 terkait Informasi Pelayanan pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.



Gambar 4. 1 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

4.4 Hasil Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

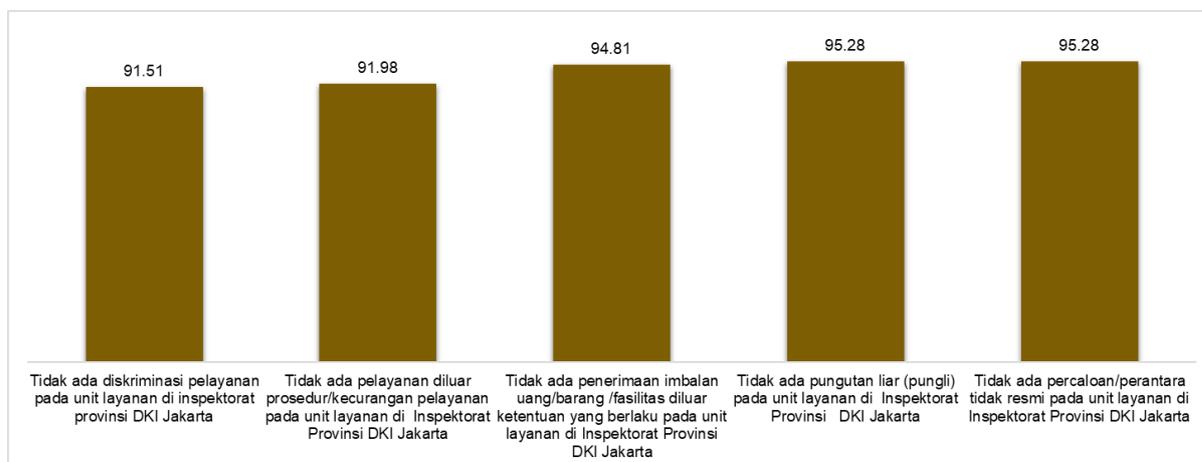
Hasil perhitungan nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat diuraikan pada tabel berikut yang sudah diurutkan berdasarkan penilaian terendah sampai dengan penilaian tertinggi:

Tabel 4. 5 Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

No	Anti Korupsi	Nilai
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta	91.51
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	91.98
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang /fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	94.81
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	95.28
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	95.28
Nilai IPAK		93.77

Sumber: Data Primer Diolah, 2024.

Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK) secara keseluruhan memperoleh nilai 93.77. Nilai Tertinggi sebesar 95.28 terkait Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi dan tidak adanya pungutan liar (pungli) pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Nilai Terendah sebesar 91.51 terkait kesesuaian bahwa Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta.



Gambar 4. 2 Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

4.5 Hasil Perbandingan Nilai Kualitas Pelayanan (IPKP) (Februari Vs Maret Tahun 2024)

Tabel 4. 6 Perbandingan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

No	Pertanyaan Kuesioner	Februari	Maret	%Perubahan
1	Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik	90.99	91.04	0.05 ↑
2	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini	91.31	91.98	0.67 ↑
3	Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan	91.09	91.51	0.42 ↑
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini	91.09	91.98	0.89 ↑
5	Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan	88.62	97.17	8.55 ↑
6	Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan	91.42	92.45	1.03 ↑
7	Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat	91.52	91.98	0.46 ↑
8	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses	91.63	91.51	-0.12 ↓
Nilai IPKP		90.96	92.45	1.49 ↑

Sumber: Data Primer Diolah, 2024.

- Nilai IPKP Maret 2024 mengalami peningkatan sebesar 1.49% , di bulan Febuari sebesar 90.96 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 92.45.
- Pernyataan tentang Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik mengalami peningkatan sebesar 0.05%, di bulan Febuari sebesar 90.99 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 91.04.
- Pernyataan tentang Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini mengalami peningkatan sebesar 0.67%, di bulan Febuari sebesar 91.31 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 91.98.
- Pernyataan tentang Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan mengalami peningkatan sebesar 0.42%, di bulan Febuari sebesar 91.09 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 91.51.
- Pernyataan tentang Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini mengalami peningkatan sebesar 0.89%, di bulan Febuari sebesar 91.09 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 91.98.

- Pernyataan tentang Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan mengalami peningkatan sebesar 8.55%, di bulan Febuari sebesar 88.62 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 97.17.
- Pernyataan tentang Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan mengalami peningkatan sebesar 1.03%, di bulan Febuari sebesar 91.42 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 92.45.
- Pernyataan tentang Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat mengalami peningkatan sebesar 0.46%, di bulan Febuari sebesar 91.52 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 91.98.
- Pernyataan tentang Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses mengalami penurunan sebesar 0.12%, di bulan Febuari sebesar 91.63 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 91.51.

4.6 Hasil Perbandingan Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK) (Februari Vs Maret Tahun 2024)

Tabel 4. 7 Perbandingan Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

No	Pertanyaan Kuesioner	Februari	Maret	%Perubahan
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	93.35	91.51	-1.84 ↓
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	92.81	91.98	-0.83 ↓
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang /fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	93.89	94.81	0.92 ↑
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	94.32	95.28	0.96 ↑
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini	94.43	95.28	0.85 ↑
Nilai IPAK		93.76	93.77	0.01 ↑

- Nilai IPAK Maret 2024 mengalami peningkatan sebesar 0.01% , di bulan Febuari sebesar 93.76 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 93.77.
- Pernyataan tentang Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini mengalami penurunan sebesar 1.84%, di bulan Febuari sebesar 93.35 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 91.51.

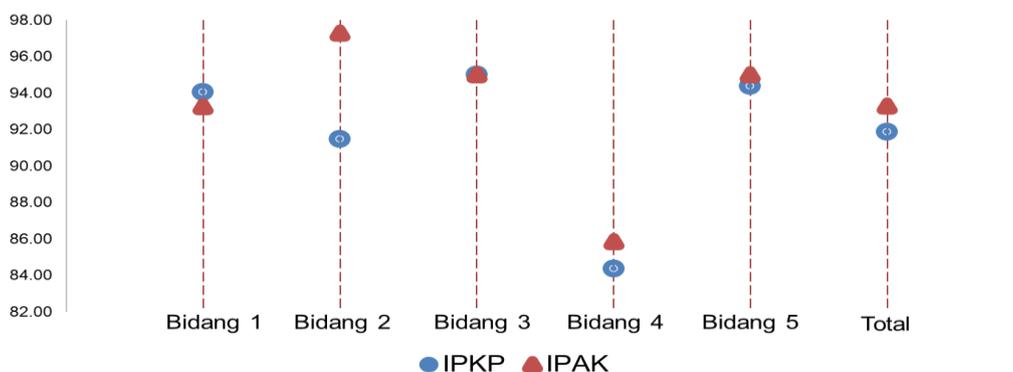
- Pernyataan tentang Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini mwngalami penurunan sebesar 0.83%, di bulan Febuari sebesar 92.81 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 91.98.
- Pernyataan tentang Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang /fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini mengalami peningkatan sebesar 0.92%, di bulan Febuari sebesar 93.89 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 94.81.
- Pernyataan tentang Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini mengalami peninglatan sebesar 0.96%, di bulan Febuari sebesar 94.32 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 95.28.
- Pernyataan tentang Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini mengalami peningkatan sebesar 0.85%, di bulan Febuari sebesar 94.43 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 95.28.

4.7 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Per Bidang

Hasil perhitungan Nilai IPKP dan IPKP per bidang dapat dilihat dari grafik . Nilai IPKP tertinggi sebesar 95 pada Bidang 3 dan IPKP terendah sebesar 84.38 pada Bidang 4. Nilai IPKA tertinggi sebesar 97.27 pada Bidang 2 dan IPKA terendah sebesar 85.83 pada Bidang 4. Bidang 4 konsisten memberikan penilaian terendah pada nilai IPKP dan IPKA

Tabel 4. 8 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Per Bidang

Bidang	n	Nilai IPKP	Nilai IPKA
Bidang 1	20	94.06	93.25
Bidang 2	11	91.48	97.27
Bidang 3	5	95.00	95.00
Bidang 4	6	84.38	85.83
Bidang 5	10	94.38	95.00
Total	52	91.86	93.27



Gambar 4. 3 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Per Bidang

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Total target responden adalah 55 dengan persentase capaian responden sebanyak 53 responden atau 96%.
2. Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang mengukur IPKP dan IPAK sudah Valid dan reliabel.
3. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) secara keseluruhan memperoleh nilai 92.45
4. Nilai IPKP Maret 2024 mengalami peningkatan sebesar 1.49% , di bulan Febuari sebesar 90.96 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 92.45.
5. Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK) secara keseluruhan memperoleh nilai 93.77.
6. Nilai IPAK Maret 2024 mengalami peningkatan sebesar 0.01% , di bulan Febuari sebesar 93.76 dan saat ini penilaian bulan Maret sebesar 93.77.

5.2 Saran

Berikut adalah Saran dari seluruh responden yang memberikan saran terakit peningkatan kualitas pelayanan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 5. 1 Saran

Sebagian besar responden memberikan saran terakit peningkatan kualitas pelayanannya artinya harapan dari responden agar kualitas pelayanan selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Selain itu diharapkan Ispektorat rutin mengadakan Sisialisasi anti korupsi , menjadi pendamping yang baik dalam memberikan solusi terbaik, tetap menjadag aintegritas dan konsistensi dalam pencegahan korupsi, Perlunya layanan real time tanya jawab di Web

Inspektorat dan terakhir adalah penyampaian informasi yang lebih cepat. Berikut adalah sebaran saran per bidang hasil dari kuesioner :

Tabel 5. 1 Saran Per Bidang

Bidang	Mohon Berikan Saran dan Masukan yang berarti bagi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan dalam penegakan Anti Korupsi
Bidang 1	<ul style="list-style-type: none"> • Dipertahankan dan jika memungkinkan ditingkatkan kualitas pelayanannya
	<ul style="list-style-type: none"> • Respon Pelayanan agar dibuatkan aplikasi atau sistem dua arah supaya penanganan pelayanan inspektorat lebih ceepat, efektif dan efisien
	<ul style="list-style-type: none"> • pendampingan lebih intens lagi, terima kasih
	<ul style="list-style-type: none"> • Ditingkatkan lagi layanan anti korupsi di Inspektorat
	<ul style="list-style-type: none"> • sosialisasi pemahaman
	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah baik, pertahankan
	<ul style="list-style-type: none"> • Peran yang sangat penting bagi APIP saat ini adalah Advisory. Namun unsur Inspektorat yang hadir dalam rapat pembahasan penyelesaian suatu masalah sering tidak berusaha untuk menguasai permasalahan dan tidak dapat memberikan advice yang berarti.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat konsul agar memberikan solusi yang dapat mencerahkan
	<ul style="list-style-type: none"> • Tetap jaga integritas dan independensi
	<ul style="list-style-type: none"> • bisa lebih menjadi teman diskusi dan menjadi supporting ketika menghadapi pemeriksaan eksternal
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan yang berjenjang di lingkup SKPD
	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah sesuai dengan peraturan yang ada
	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan upaya edukasi tentang pentingnya peran Inspektorat dalam menjaga kepatuhan dan integritas dalam pelayanan publik dan penegakan anti korupsi, misalnya melalui podcast, Webinar dan sebagainya.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan yang diberikan sudah sangat sesuai, untuk kedepannya diharapkan adanya peningkatan terkait penyampaian informasi yang lebih cepat

Bidang	Mohon Berikan Saran dan Masukan yang berarti bagi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan dalam penegakan Anti Korupsi
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanannya sudah sangat sesuai, sering sering diinformasikan ke UKPD yang paling bawah seperti Kelurahan • Inspektorat Provinsi DKI Jakarta saat ini semakin inovatif dalam melakukan pelayanan kepada SKPD sehingga kualitas pelayanan semakin baik. • saat ini jaman sudah 5.0, semoga Inspektorat Provinsi lebih menekankan Pembinaan dan Pelayanan • Lanjutkan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan dalam penegakan anti korupsi • Semoga kedepannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi • Untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi harus dilakukan dari atas secara konsisten
Bidang 2	<ul style="list-style-type: none"> • tetap membantu OPD • Tetap jaga integritas • terima kasih atas layanan yang telah diberikan • Lebih Banyak Sosialisasi Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Belanja kepada para PPTK di SKPD-SKPD sehingga ada kesamaan format dalam penyusunan SPJ seluruh unit di Pemprov DKI • Semoga Inspektorat Provinsi DKI Jakarta kedepan semakin maju dan sukses dalam memberikan pelayanan pendampingan audit internal di setiap OPD • Perlu ada layanan riil time tanya jawab di website Inspektorat. • Inspektorat telah menjadi Consulting Partner yang bermanfaat bagi OPD #UntungAdaInspektorat • Inspektorat lebih mendorong penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berstandar ISO keseluruh BUMD dan SKPD Pemprov. DKI Jakarta. • Sudah bagus, dipertahankan • Menyelenggarakan atau memfasilitasi pelatihan/seminra terkait anti korupsi

Bidang	Mohon Berikan Saran dan Masukan yang berarti bagi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan dalam penegakan Anti Korupsi
Bidang 3	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan sosialisasi anti korupsi secara rutin dengan mengundang instansi terkait • Inspektorat aktif membimbing dan mengawasi SKPD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SKPD utk mencegah terjadinya penyimpangan. • Pelayanan sudah baik • mohon lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitas waktu untuk berkonsultasi • terima kasih inspektorat untuk pendampingannya. mohon saat proses perencanaan APBD juga membuat forum tersendiri, terutama yang memiliki anggaran besar sehingga terhindar dari praktek KKN
Bidang 4	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih terbuka dalam menerima masukan • Pelayanan sudah cukup responsif dan informatif, agar tetap dipertahankan • lebih diintegrasikan sosialisasi anti korupsi ke setiap SKPD • Pelatihan kepada Seluruh Personil Inspektorat mengenai Independensi dan Audit Forensik
Bidang 5	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bimbingan teknis minimal 2 kali dalam setahun untuk menyegarkan kembali ingatan pegawai ASN terkait hal2 tentang Anti Korupsi • Hingga saat ini pelayanan yang diberikan sangat baik, perlu lebih ditingkatkan kembali dari kompetensi SDM dalam memberikan penjelasan kepada pemohon layanan • Pelayanan di inspektorat sudah sangat bagus. Penegakan Anti Korupsi di inspektorat juga sudah sangat bagus. Agar dipertahankan dan terus ditingkatkan • Pertahankan yang sudah baik, mohon lebih ditingkatkan lagi • Terima kasih atas cepat respon tanggap atas konsultasi yang sy lakukan dengan Pihak Inspektorat. Sehat sukses.

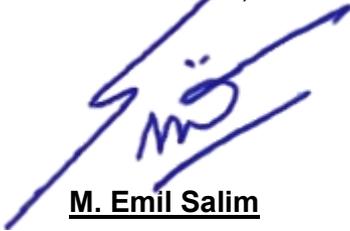
Bidang	Mohon Berikan Saran dan Masukan yang berarti bagi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan dalam penegakan Anti Korupsi
	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat sebagai mitra SKPD dalam memberikann pandangan dan wawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan di SKPD • Perbanyak sosialisasi terkait korupsi dan gratifikasi • Pelayanan dalam penegakan anti korupsi yang dilaksanakan Inspektorat sudah sangat baik. Untuk kedepannya sosialisasi terhadap anti korupsi dapat dilakukan lebih sering • Sosialisasi kembali terkait Pelayanan Online Inspektorat

PENUTUP

Demikian laporan Pelaksanaan Survei Zona Pembangunan Integritas dan Survei persepsi kualitas pelayanan ini kami sampaikan sebagai kelengkapan penyelesaian Pekerjaan. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari para peserta selama kegiatan ini berlangsung, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada **Manajemen PT Astra International, Tbk.** atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program ini sebagai salah satu program pengembangan sumber daya manusia organisasi.

Besar harapan kami Pelaksanaan Survei Zona Pembangunan Integritas dan Survei persepsi kualitas pelayanan ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam pekerjaan dan kegiatan sehari-hari.

Hormat Kami,



M. Emil Salim

VP SBU Operations 1